



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

QUARTERLY FISCAL REPORT PROVINSI JAMBI

TRIWULAN I 2018



**KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
MEI 2018**

DAFTAR ISI

I.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	- 1 -
A.	Produk Domestik Regional Bruto	- 1 -
B.	Inflasi.....	- 2 -
C.	Indikator Kesejahteraan	- 3 -
II.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN.....	- 4 -
A.	Pendapatan Negara	- 5 -
B.	Belanja Negara	- 8 -
C.	Prognosis Realisasi APBN.....	- 10 -
III.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD.....	- 11 -
A.	Pendapatan Daerah	- 13 -
B.	Belanja Daerah	- 15 -
C.	Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2017.....	- 16 -
IV.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	- 17 -
V.	BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	- 24 -
A.	Keterkaitan dan Implikasi Alokasi Belanja Sektor Pendidikan, Indikator Pembangunan Manusia (Pengetahuan), Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Jambi	- 24 -



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2018

Penyusun:

Penanggung Jawab: Tiarta Sebayang | Ketua Tim: Ahmad Yani |
Editor: Adolf Purba | Yuli Nezal | Desain Foto: Gita Ashabira |
Penyusun: Dyan Ari Iswanto | Bidang PPA II | BPS Prov. Jambi |
Bank Indonesia Perwakilan Jambi

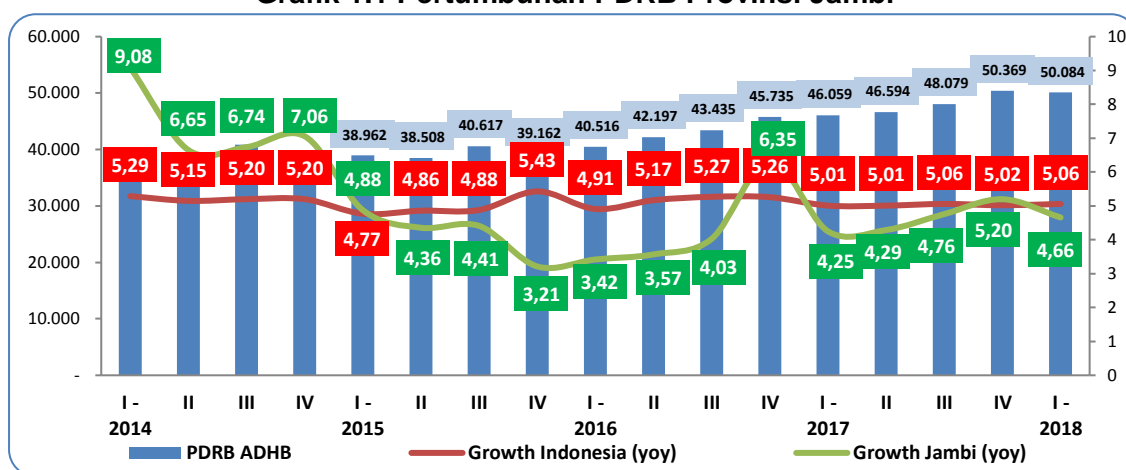
KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Jambi

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD maupun alokasi dana APBN di daerah (DIPA kewenangan kantor pusat K/L, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama) merupakan salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping konsumsi dan investasi. Perekonomian Provinsi Jambi pada triwulan I 2018 tumbuh sebesar 4,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tumbuh 4,25% (yoy). Pertumbuhan ini juga masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,06% (yoy). Output ekonomi Provinsi Jambi triwulan I ini menghasilkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp50,08 triliun atau 1,43% dari total output Nasional (Rp3.505,3 triliun).

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi



Sumber: BPS (dalam Miliar Rp)

Menurut lapangan usaha, triwulan ini pertumbuhan ekonomi Jambi didorong oleh semua sektor lapangan usaha. Tiga sektor tertinggi pertumbuhannya (yoy) yaitu konstruksi (9,16%), informasi dan komunikasi (8,65%), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (8,44%). Pada triwulan ini, sektor yang menjadi penyumbang andil terbesar pertumbuhan Jambi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,43%. Sedangkan menurut pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh pengeluaran konsumsi LNRT (15,6%), diikuti impor barang dan jasa (9,56%), sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,24%.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, terdapat beberapa fenomena yang mempengaruhi output ekonomi Jambi, yaitu: (1) Curah hujan yang merata sepanjang tahun 2017 (musim tanam padi tidak mengalami pergeseran), panen raya padi jatuh pada triwulan I-2018 dan produksi padi meningkat dibanding triwulan sebelumnya, (2) peningkatan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh stabilnya harga beberapa komoditas unggulan Jambi selama triwulan I-2018, (3) harga migas dan batubara yang tinggi di pasar global mendorong peningkatan produksi sehingga ekspor meningkat, (4) realisasi APBN dan APBD triwulan I-2018 lebih lambat dibanding triwulan I-2017, dengan realisasi belanja modal APBN lebih rendah dibanding triwulan I-2017.

Output ekonomi Jambi triwulan I 2018 masih tumbuh 4,66% (yoy). Proyeksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi untuk ekonomi Jambi pada triwulan II diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,55%-4,95%.

Dilihat dari strukturnya, (sisi lapangan usaha) ekonomi Provinsi Jambi belum mengalami perubahan, masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,78% dan diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 19,28%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa menyumbang 69,29%, impor barang dan jasa (sebagai pengurang) sebesar 40,92%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 44,34%. Berdasarkan strukturnya menunjukkan bahwa ekonomi Jambi masih dominan berbasis pada sektor primer dengan kemampuan penciptaan nilai tambah yang rendah.

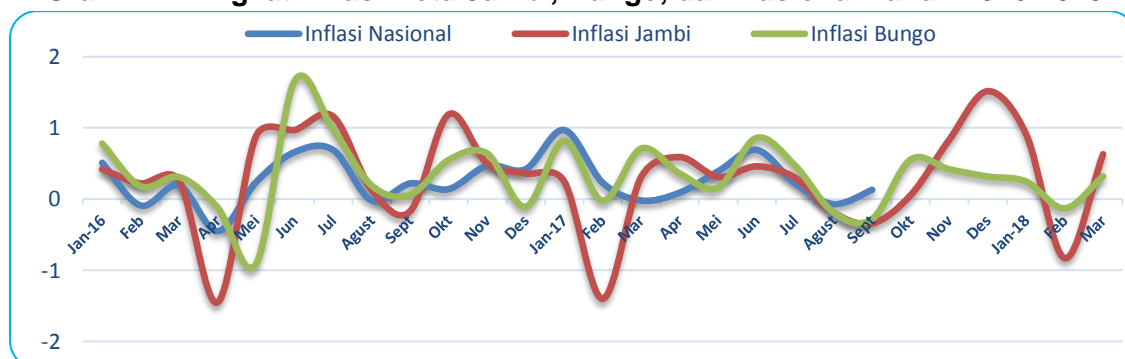
Berikutnya berdasarkan proyeksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, ekonomi Jambi pada triwulan II diperkirakan tumbuh di kisaran 4,55%-4,95%. Selain sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian masih akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi pada triwulan II mengingat harga komoditas migas dan batubara masih cukup tinggi. Fenomena bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan Pemilu Kepala Daerah yang jatuh pada triwulan II-2018 juga akan mendorong konsumsi masyarakat.

B. Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan variabel penting dalam penyusunan kebijakan fiskal yang tercermin dalam APBN dan APBD, serta pengaruhnya terhadap realisasi anggaran pemerintah di daerah.

Data BPS triwulan I 2018, berdasarkan perhitungan bulanan (*mtm*) bulan Januari, Februari, Maret untuk Kota Jambi mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,91%, -0,83%, dan 0,63%. Sedangkan inflasi Bungo masing-masing sebesar 0,25%, -0,13%, dan 0,32%. Kota Jambi berdasarkan perhitungan triwulanan (*qtq*) mengalami inflasi sebesar 0,68%.

Grafik 1.2 Tingkat Inflasi Kota Jambi, Bungo, dan Nasional Tahun 2016-2018



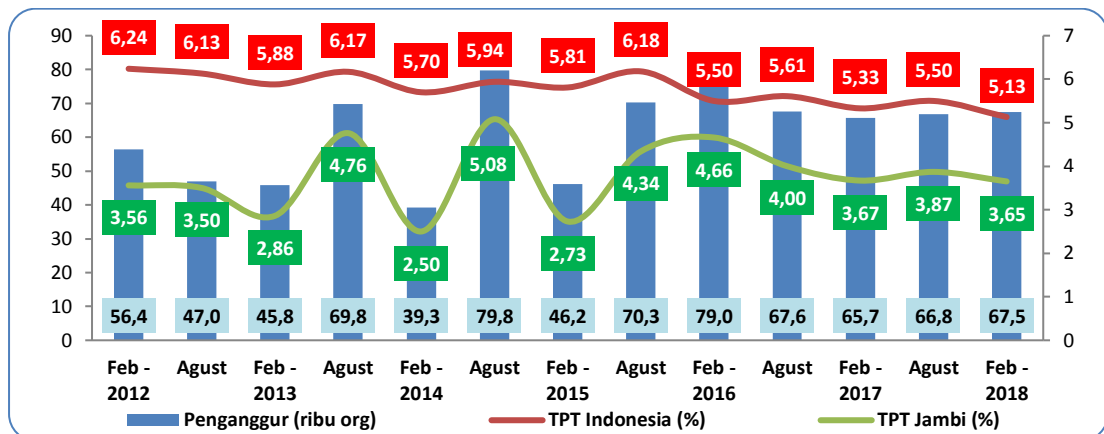
Sumber: BPS

Berdasarkan asesmen Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, sumber inflasi yang berasal dari komponen *volatile foods* berasal dari komoditas ayam ras, cabe dan bawang merah. Proyeksi inflasi Bank Indonesia, faktor *upside risks* inflasi pada triwulan II-2018 diantaranya (1) curah hujan yang tinggi diperkirakan akan sedikit mengganggu jalur distribusi tanaman pangan (mudah busuk), (2) adanya kebijakan pemerintah khususnya pakan ayam tidak diperbolehkan menggunakan antibiotik berdampak pada bobot ayam menjadi tidak optimal sehingga akan mempengaruhi harga jual ayam ras yang dapat memicu inflasi.

Menurut data BPS (yoy), dari 23 kota se-Sumatera yang dihitung tingkat inflasinya, Bungo (3,97%) dan Kota Jambi (2,34%) menempati urutan tertinggi ke-6 dan ke-22. Inflasi tertinggi di Kota Pekanbaru (5,11%) dan terendah di Kota Bukittinggi (1,15%).

C. Indikator Kesejahteraan

Grafik 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jambi dan Nasional Tahun 2012-2018

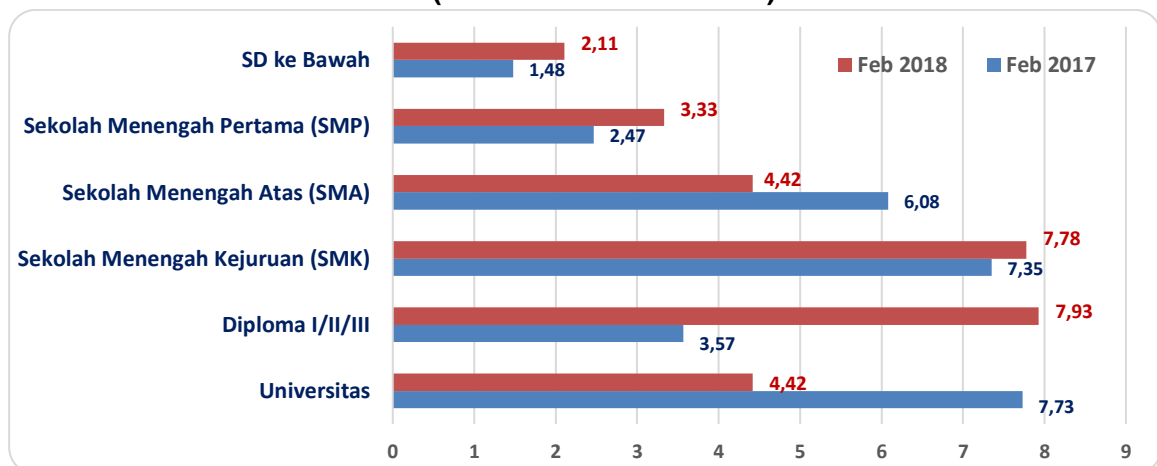


Sumber: BPS

“Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi pada Februari 2018 tercatat sebanyak 67,5 ribu orang. Jumlah ini lebih tinggi sebesar 1,8 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai 65,7 ribu orang”

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2018 sebesar 3,65%, turun dibandingkan pada Februari 2017 (3,67%), dan masih lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 5,13%. Meskipun jumlah TPT Jambi turun namun terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) penyumbang tertinggi tingkat pengangguran terdapat pada golongan dengan tingkat pendidikan diploma I/II/III dan sekolah menengah kejuruan (SMK), dapat diindikasikan bahwa keterampilan yang dihasilkan oleh jenjang pendidikan vokasi dan SMK belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. (2) tenaga kerja yang terserap lapangan kerja masih didominasi (42,7%) oleh golongan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah sebanyak 759,9 ribu orang.

Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan (Februari 2018 dan 2017)



Sumber: BPS

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Informasi berikut merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluruh Kementerian/Lembaga/Satker lingkup Provinsi Jambi, termasuk data Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018;

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2018 dan 2017

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	4.910,6	898,1	5.445,2	1.041,5
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	4.910,6	898,1	5.445,2	1.041,5
1. Penerimaan Pajak	4.498,7	753,9	5.445,2	927,5
2. PNBPN	411,9	144,2	-	114,1
II. HIBAH	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	19.963,6	4.704,9	20.044,9	4.277,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	5.934,4	784,9	6.398,9	747,7
1. Belanja Pegawai	2.220,3	412,8	2.278,1	409,8
2. Belanja Barang	2.217,0	190,3	2.534,0	263,5
3. Belanja Modal	1.471,3	181,6	1.567,8	74,4
4. Belanja Bantuan Sosial	25,7	0,2	18,9	-
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	14.029,3	3.920,0	13.646,0	3.529,8
1. Transfer ke Daerah	12.938,3	3.920,0	12.598,7	3.298,1
a. Dana Perimbangan	12.873,4	3.876,3	12.378,2	3.236,4
1) Dana Alokasi Umum	7.957,6	2.657,2	7.969,3	2.656,4
2) Dana Bagi Hasil	2.076,0	798,6	1.434,2	267,7
3) Dana Alokasi Khusus	2.839,8	420,5	2.974,7	312,2
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	65,0	43,7	220,5	61,8
2. Dana Desa	1.090,9	-	1.047,3	231,7
C. SURPLUS/DEFISIT	(15.053,0)	(3.806,8)	(14.599,7)	(3.235,9)

Sumber: SPAN, SIMTRADA, KPP se-Prov. Jambi (*Unaudited*)

Realisasi APBN lingkup Provinsi Jambi s.d. triwulan I-2018 menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp1,04 triliun. Tumbuh sebesar 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp898,1 miliar). Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh perbaikan kinerja penerimaan perpajakan (Rp927,5 miliar) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp114,1 miliar. Meskipun secara kumulatif penerimaan perpajakan mampu tumbuh 23,0% dibanding tahun 2017 (Rp753,9 miliar), namun jumlah tersebut belum termasuk pengembalian (restitusi) pajak yang mencapai Rp318,4 miliar.

Realisasi belanja negara sebesar Rp4,27 triliun, kontraksi 10,1% dibanding triwulan I-2017 (Rp4,70 triliun). Jumlah tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp747,7 miliar dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp3,59 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga triwulan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp3,92 triliun). Salah satu faktornya adalah masih lambatnya satuan kerja K/L dalam melakukan eksekusi anggarannya. Disamping itu, terdapat kebijakan pemerintah untuk membatasi revisi DIPA oleh satuan kerja sebagai bentuk komitmen K/L terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

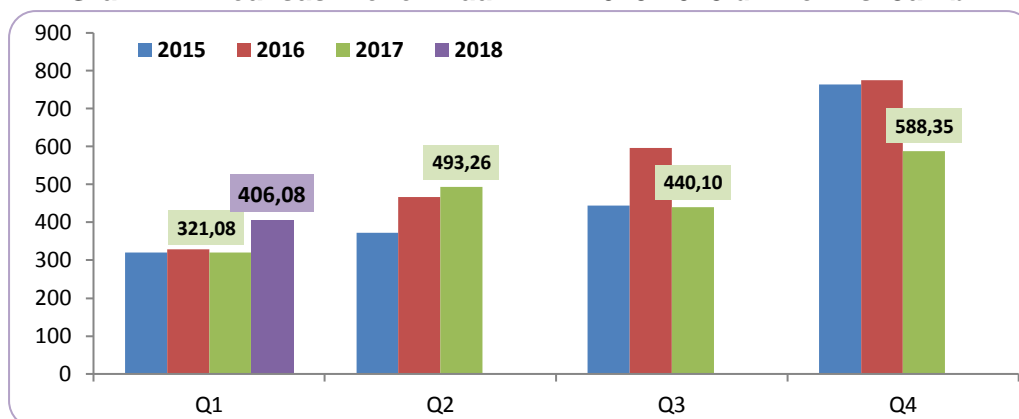
A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak internasional. Berikut adalah data pendapatan perpajakan yang dihasilkan di Provinsi Jambi;

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan PPh 2015-2018 di Provinsi Jambi

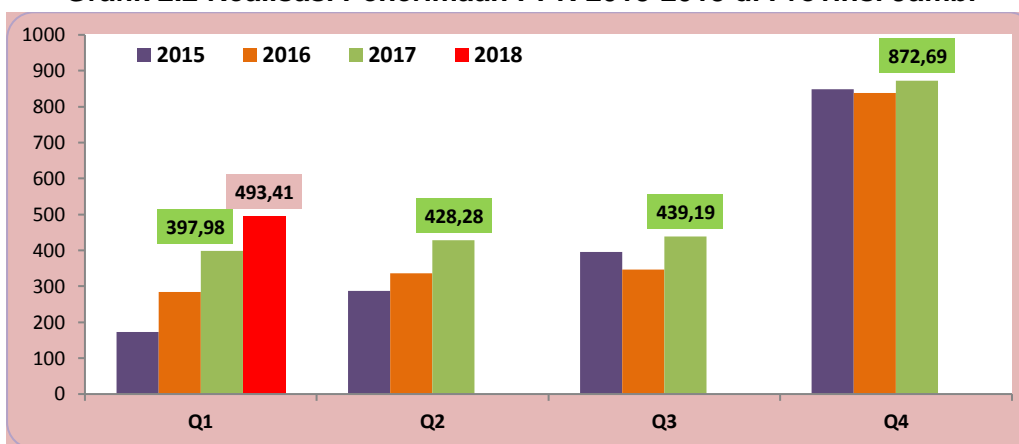


Sumber: SPAN (diolah); (dalam Miliar Rp)

Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) triwulan I sebesar Rp406,1 miliar. Jumlah tersebut naik 26,4% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017 (Rp321,08 miliar). Peningkatan disumbang oleh realisasi PPh Ps 25/29 Badan sebesar Rp105,8 miliar (triwulan I-2017 Rp85,0 miliar) atau naik Rp20,8 miliar. Selanjutnya, PPh Ps 21 dan PPh Final masih mampu tumbuh masing-masing sebesar Rp116,6 miliar (27,5%) dan Rp94,1 miliar (11,8%) dibanding triwulan tahun sebelumnya (Rp91,5 miliar dan Rp84,0 miliar).

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan PPN 2015-2018 di Provinsi Jambi

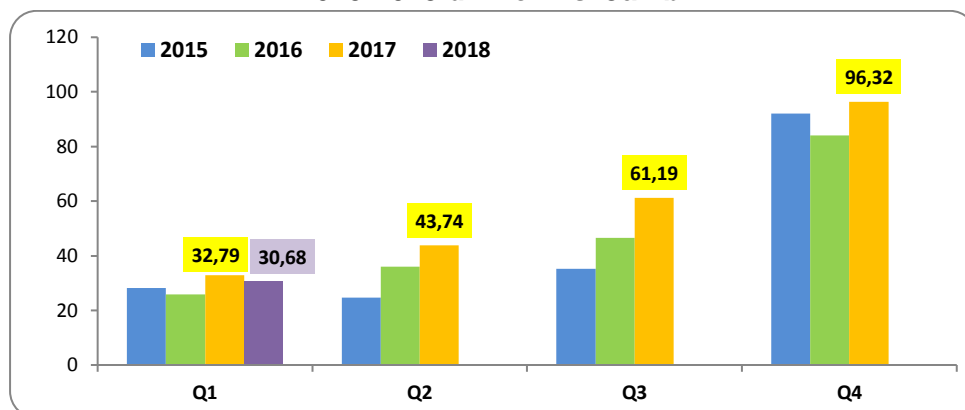


Sumber: KPP se-Prov. Jambi (diolah) (dalam Miliar Rp)

Realisasi PPN triwulan I 2018 sebesar Rp493,41 miliar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 24% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017 (Rp397,98 miliar). PPN Dalam Negeri masih menjadi kontributor terbesar pembentuk penerimaan PPN sebesar Rp480,8 miliar. PPN Dalam Negeri sangat dominan nilai setorannya hingga mencapai 97,5% dari total Penerimaan PPN. Sedangkan PPN Impor, PPN Lainnya dan PPnBM Dalam Negeri hanya menyumbang masing-masing Rp11,5 miliar, Rp0,11 miliar dan Rp0,98 miliar.

c) Pendapatan Pajak Lainnya & Pajak Perdagangan Internasional

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pajak Lainnya & Pajak Perdagangan Internasional 2015-2018 di Provinsi Jambi

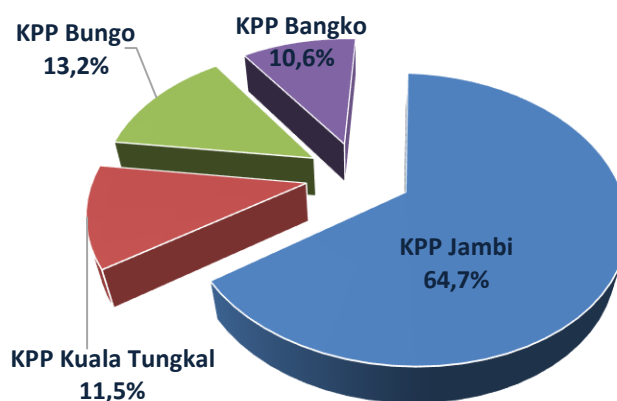


Sumber: SPAN (diolah) (dalam Miliar Rp)

Realisasi Pendapatan Pajak Lainnya dan Pajak Perdagangan Internasional triwulan I-2018 mencapai Rp30,68 miliar. Turun sedikit dibanding periode yang sama tahun 2017 (Rp32,79 miliar). Rinciannya, Pendapatan Pajak Lainnya Rp25,63 miliar. Terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp1,49 miliar dan Pajak Lainnya Rp11,69 miliar, sedangkan realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp19,45 miliar terdiri dari Bea Masuk (Rp5,84 miliar) dan Bea Keluar (Rp11,65 miliar).

Penerimaan Pajak Menurut KPP Lingkup Provinsi Jambi

Grafik 2.4 Komposisi Penerimaan Pajak Menurut KPP Tahun 2018 (s.d. Triwulan I)



Sumber: KPP se-Provinsi Jambi

Berdasarkan data dari KPP di Provinsi Jambi (dari target Rp4,49 triliun), hingga 2018-Q1 telah tercapai sebesar Rp927,4 miliar atau 17,03% dari target. Capaian tersebut masih lebih baik jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (16,76%). Secara nominal, KPP Jambi memiliki realisasi terbesar Rp599,9 miliar (17,4% dari target Rp3,44 triliun). Sedangkan dari target, realisasi KPP Muara Bungo (Rp122,4 miliar) memiliki capaian tertinggi 17,5% dari target Rp697,9 miliar.

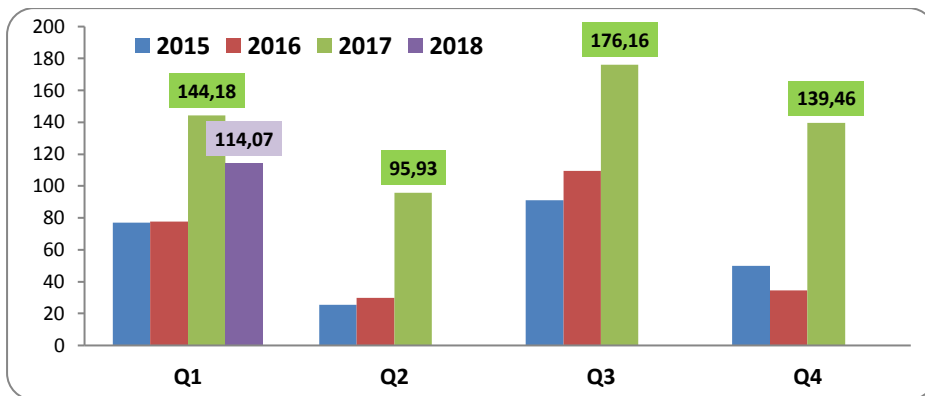
Proyeksi realisasi pendapatan perpajakan s.d. triwulan IV-2018 masih pada kisaran 80%-90% dari total target penerimaan perpajakan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP adalah salah satu komponen anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara. Realisasi PNBP di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan PNBP

Grafik 2.5 Realisasi PNBP 2015-2018 di Provinsi Jambi

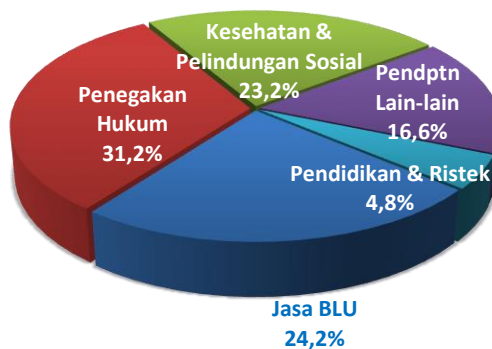


Sumber: SPAN (diolah); (dalam Miliar Rp)

Realisasi PNBP triwulan I 2018 sebesar Rp114,07 miliar atau mengalami kontraksi 20,8% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (Rp144,18 miliar). Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum penyumbang terbesar dengan Rp33,04 miliar dan diikuti Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLU) sebesar Rp25,6 miliar.

b) Komposisi PNBP di Provinsi Jambi

Grafik 2.6 Komposisi Realisasi PNBP di Provinsi Jambi Tahun 2018 (s.d. triwulan I)



Sumber: SPAN (diolah)

Secara akumulatif, komposisi PNBP s.d. triwulan I 2018 didominasi oleh Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp33,04 miliar atau 31,2% dari total PNBP. Berikutnya, Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLU) sebesar Rp25,6 miliar (24,2%), Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan Rp24,3 miliar (23,2%), Pendapatan Lain-lain Rp17,6 miliar (16,6%), dan Pendapatan Pendidikan dan Ristek sebesar Rp5,1 miliar.

Pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) Badan Layanan Umum di wilayah Provinsi Jambi, yaitu: 1 BLU Bidang Kesehatan (RS. Bhayangkara Jambi) dan 2 BLU Bidang Pendidikan (UIN Sultan Thaha Saefudin dan Universitas Jambi)

3. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan salah satu komponen APBN sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN, baik hibah langsung maupun hibah tidak langsung. Berdasarkan data SPAN, untuk Provinsi Jambi s.d. triwulan I 2018 **tidak terdapat** penerimaan yang berbentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

**Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Hibah s.d. Triwulan I
Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2018**

(dalam Juta Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I (Rp)	(%) Realisasi atas Pagu
Hibah	-	-	-
Hibah Langsung	-	-	-
Total Hibah	-	-	-

Sumber: SPAN

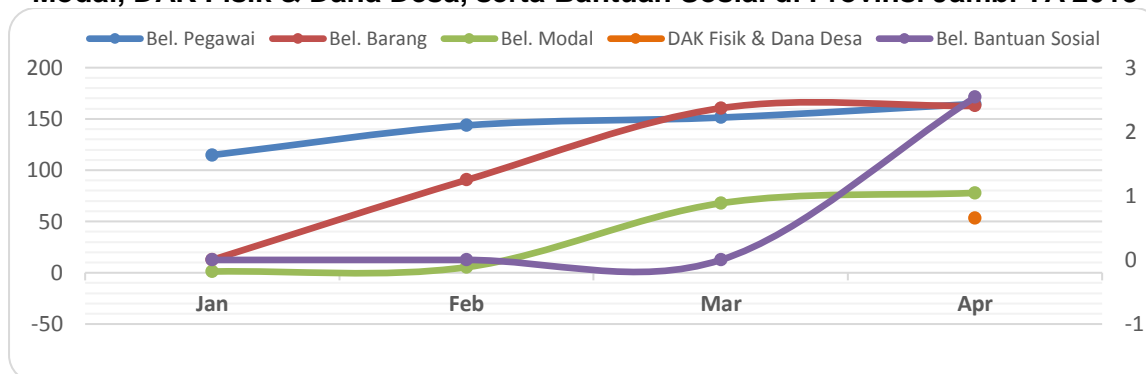
B. Belanja Negara

Belanja negara merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal. Salah satu yang populer pada saat krisis ekonomi adalah instrumen ekonomi berupa stimulus fiskal. Secara garis besar, komposisi dari stimulus fiskal adalah berupa tambahan belanja pemerintah (*increased spending*) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan untuk membantu sektor riil.

Belanja negara (APBN) di Provinsi Jambi dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu:

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik 2.7 Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, DAK Fisik & Dana Desa, serta Bantuan Sosial di Provinsi Jambi TA 2018

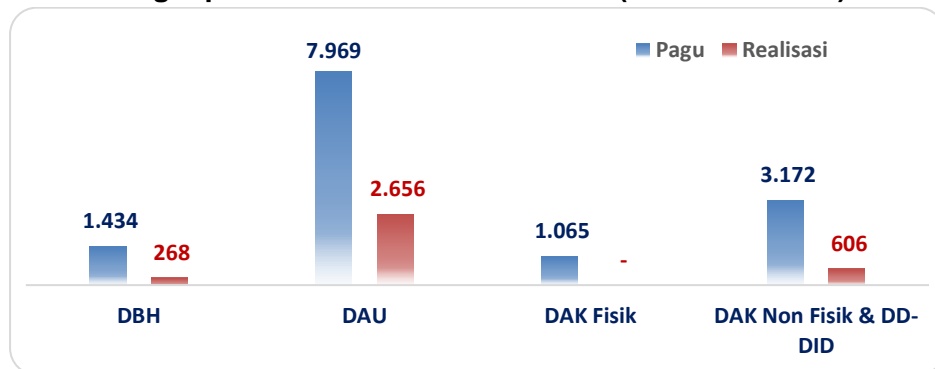


Sumber: SPAN (diolah) (dalam Miliar Rp)

Realisasi belanja (APBN) di Provinsi Jambi s.d. triwulan I 2018 baru tercapai Rp979,3 miliar (tidak termasuk DAU, DBH, dan DAK Non Fisik) atau hanya 11,5% dari total pagu alokasi. Rinciannya, belanja pegawai Rp409,79 miliar, belanja barang Rp263,46 miliar, belanja modal Rp74,39 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp231,65 miliar. Untuk triwulan I, belum terdapat realisasi belanja bantuan sosial dan DAK Fisik yang disalurkan oleh KPPN. Rendahnya kinerja penyerapan, Kanwil DJPB Prov. Jambi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja dengan alokasi pagu cukup besar sebagai bentuk tindak lanjut dalam rangka perbaikan kinerja penyerapan pada triwulan selanjutnya seiring dengan akselerasi belanja barang dan belanja modal pemerintah agar sesuai dengan rencana penarikan dana dan data kontrak yang membebani belanja dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing satuan kerja kementerian/lembaga.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Grafik 2.8 Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2018 (s.d. Maret 2018)



Sumber: SPAN, SIMTRADA (diolah) (dalam Miliar Rp)

Realisasi penyaluran Dana Transfer ke Kas Daerah hingga triwulan I 2018 sebesar Rp3,53triliun atau 25,9% dari alokasi pagu. Hingga periode Mei 2018, belum terdapat realisasi DAK Fisik yang disalurkan oleh KPPN. Penyebabnya adalah belum ada satupun pemda yang melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik 2018, salah satu diantaranya yaitu pemda belum melakukan input data capaian output DAK Fisik 2017 dan data kontrak untuk DAK Fisik 2018 sebagai akibat masih terkendala dengan proses pengadaan barang dan jasa. Mekanisme penyaluran oleh KPPN dilaksanakan berdasarkan pada **capaian penyerapan belanja** dan **capaian output** per bidang (yang dikelola oleh SKPD Pemda) untuk DAK Fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga realisasinya akan berdasarkan prestasi masing-masing Pemda dalam melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa .

Pengelolaan BLU

Pada 2018, BLU Pusat yang terdapat di wilayah kerja Kanwil DJPB Provinsi Jambi adalah UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi. Kemudian ditambah Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang telah ditetapkan menjadi BLU di bidang pelayanan kesehatan (pertengahan triwulan II-2017) dan terakhir adalah Universitas Jambi (akhir tahun 2017).

Untuk RS Bhayangkara, saat ini sudah menjadi BLU Kesehatan secara penuh. Tahapan masa transisi telah dilalui RS Bhayangkara dengan memenuhi seluruh persyaratan sesuai standar pelayanan minimal BLU di bidang kesehatan.

Manajemen Investasi Pusat

Perkembangan Penyaluran KUR di Provinsi Jambi

Di Provinsi Jambi, penyaluran KUR (Mikro, Ritel, dan TKI) dilaksanakan oleh 11 (sebelas) lembaga keuangan perbankan, yaitu BRI, Mandiri, BNI, Bank Artha Graha, BCA, Maybank, BPD Jambi, BPD Sumatera Barat, Bank Sinarmas, Bank Bukopin, dan BRI AGRO dengan total nilai *outstanding* Rp1,08 triliun. Berdasarkan data SIKP, nilai akad realisasi KUR 2017 mencapai Rp1,53 triliun yang disalurkan perbankan dan lembaga keuangan non bank (PT Mega Central Finance dan PNM-khusus kredit Ultra Mikro) di Provinsi Jambi.

Tabel 2.4 Realisasi Penyaluran KUR Menurut Sektor Usaha 2017

No	Sektor Usaha	Realisasi KUR 2017		
		Akad (dlm jutaan)	Outstanding (dml jutaan)	Debitur
1	Pertanian dan Kehutanan	888.728	690.031	21.021
2	Perikanan	21.334	12.607	461
3	Industri Pengolahan	36.343	24.375	1.082
4	Perdagangan Besar & Eceran	497.906	303.853	14.606
5	Penyediaan Akomodasi & Makanan	19.880	14.664	362
6	Transportasi, Pergudangan, & Komunikasi	12.304	8.972	285
7	Real Estate, Persewaan & Jasa	3.647	2.129	57
8	Jasa Pendidikan	368	294	12
9	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	525	19	2
10	Jasa Kemasyarakatan, Sosbud, & Hiburan	46.963	29.257	1.769
Total		1.527.997	1.086.201	39.657

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

Sektor usaha yang paling besar menerima program KUR didominasi oleh sektor Pertanian dan Kehutanan dengan nilai outstanding Rp690,0 miliar. Diikuti oleh sektor Perdagangan Besar & Eceran dengan nilai outstanding Rp303,8 miliar dan sisanya (Rp92,4 miliar) terbagi ke 8 sektor lainnya. Penyaluran KUR Mikro didominasi oleh BRI dengan nilai outstanding Rp296,1 miliar, Bank Mandiri dominan menyalurkan KUR Ritel (Rp622,6 miliar).

Belum optimalnya realisasi penyaluran KUR di Provinsi Jambi salah satu penyebab utamanya adalah masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi yang mendorong akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu bersaing dalam iklim usaha yang kompetitif.

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan pendapatan dan belanja APBN s.d. triwulan I-2018 lingkup Provinsi Jambi masing-masing Rp4,23 triliun (77,7% dari target) dan Rp7,79 triliun (91,62%). Rendahnya proyeksi pendapatan memperhatikan masih fluktuatifnya harga komoditas unggulan (sawit dan karet) sehingga akan mempengaruhi pendapatan perpajakan (PPH Ps.21 dan Ps.25/29 Badan). Untuk belanja, diharapkan capaiannya bisa melebihi proyeksi mempertimbangkan telah ditetapkannya petunjuk teknis revisi DIPA 2018 sehingga diharapkan belanja dapat diserap sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.5 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan IV Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV*	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	5.445,18	927,46	17,03%	4.231,05	77,70%
Belanja Negara	8.504,61	979,31	11,51%	7.792,34	91,62%
Surplus/Defisit	(1.023,73)	(525,43)	-	(1.361,27)	-

Ket: tidak termasuk transfer ke daerah dan dana desa

*) perkiraan realisasi menggunakan metode analisis *trend*

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Informasi berikut merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Provinsi Jambi;

**Tabel 3.1 Realisasi APBD Agregat Lingkup Provinsi Jambi
s.d. Triwulan I TA 2018 dan 2017**

(dalam Miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	16.279,6	4.188,0	17.317,4	3.628,7
PAD	2.473,8	455,7	2.689,0	448,1
Pajak Daerah	1.565,9	332,8	1.700,8	341,1
Retribusi Daerah	199,7	24,3	121,2	19,7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	108,1	0,5	128,6	0,7
Lain-Lain PAD yang Sah	600,2	98,1	738,5	86,7
Pendapatan Transfer	13.767,0	3.731,3	14.466,4	3.179,7
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	12.348,3	3.640,9	12.533,0	2.961,6
Dana Bagi Hasil Pajak	987,5	403,6	1.006,9	-
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	179,3	164,9	223,5	107,2
Dana Alokasi Umum	8.462,6	2.719,3	8.289,4	2.537,8
Dana Alokasi Khusus	2.718,9	353,0	3.013,2	316,6
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	947,8	90,5	1.303,9	216,0
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	947,8	90,5	1.303,9	216,0
Transfer Pemerintah Provinsi	470,8	-	524,8	2,1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	470,8	-	524,8	2,1
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	-	-	104,7	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	-	-	104,7	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38,8	1,0	161,9	0,8
Pendapatan Hibah	8,1	0,9	160,9	0,8
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	30,7	0,1	1,0	0,0
JUMLAH PENDAPATAN	16.279,6	4.188,0	17.317,4	3.628,7

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
BELANJA	14.885,8	1.340,2	15.726,7	1.420,0
Belanja Pegawai	6.713,3	1.021,8	7.263,6	992,2
Belanja Barang	3.207,6	212,4	3.675,3	259,7
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	14,9	3,7	41,3	3,1
Belanja Hibah	793,1	21,0	690,8	79,4
Belanja Bantuan Sosial	33,6	15,7	42,7	17,5
Belanja Bantuan Keuangan	333,1	-	129,1	-
Belanja Modal	3.736,2	63,2	3.850,3	66,7
Belanja Tidak Terduga	54,1	2,5	33,7	1,4
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.203,2	8,7	2.444,9	46,3
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	565,6	-	593,3	0,4
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	562,7	-	593,3	0,4
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2,9	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	1.637,6	8,7	1.851,6	45,9
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	2,7	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.633,3	8,7	1.836,4	45,9
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4,3	-	12,5	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	17.089,0	1.348,9	18.171,5	1.466,3
SURPLUS/DEFISIT	(809,4)	2.839,1	(854,1)	2.162,4

Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD se-Provinsi Jambi (data diolah); (Unaudited)

Realisasi APBD agregat lingkup Provinsi Jambi s.d. triwulan I 2018 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp3,63 triliun atau 70,8% dari total pagu pendapatan daerah. Jumlah realisasi tersebut lebih rendah 6,6% dibandingkan tahun sebelumnya (Rp4,19 triliun). Komposisinya pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp448,1 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp3,18 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,8 miliar.

Berikutnya, realisasi APBD untuk belanja dan transfer daerah baru mencapai Rp1,46 triliun atau 8,0% dari total pagu belanja dan transfer daerah. Terdapat sedikit perbaikan jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,35 triliun. Realisasi belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp259,7 miliar dan Rp66,7 miliar, lebih baik dibanding realisasi tahun sebelumnya (Rp212,4 miliar dan Rp63,2 miliar). Sedangkan realisasi transfer pemerintah daerah sebesar Rp46,3 miliar, jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya (Rp8,7 miliar).

Adanya kasus hukum terkait penetapan RAPBD Prov. Jambi 2018 yang membelit anggota DPRD dan Gubernur serta beberapa pejabat OPD cukup berdampak terhadap kinerja roda pemerintahan. Hal itu terlihat dari rendahnya realisasi belanja APBD secara agregat. Total belanja realisasi belanja (s.d triwulan I 2018) masih sangat minim (8,07% dari total pagu agregat) Rendahnya kinerja realisasi belanja daerah juga terlihat dari selisih total pendapatan daerah dengan total belanja dan transfer yang mencapai surplus Rp2,22 triliun. Peran *government spending* (pengeluaran konsumsi pemerintah) sebagai stimulus ekonomi Jambi menjadi tidak optimal mengingat laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih ditopang oleh sektor primer yang sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas global.

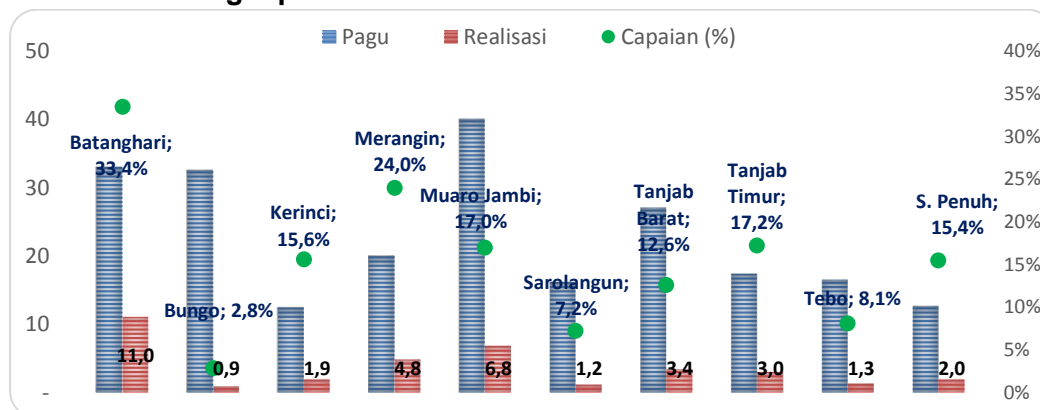
A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD (agregat) sebesar Rp448,1 miliar terdiri dari Pajak Daerah Rp341,1 miliar, Retribusi Daerah Rp19,7 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp0,7 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp86,7 miliar. Capaian realisasi PAD agregat mencapai 16,6% dari total target PAD.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2018

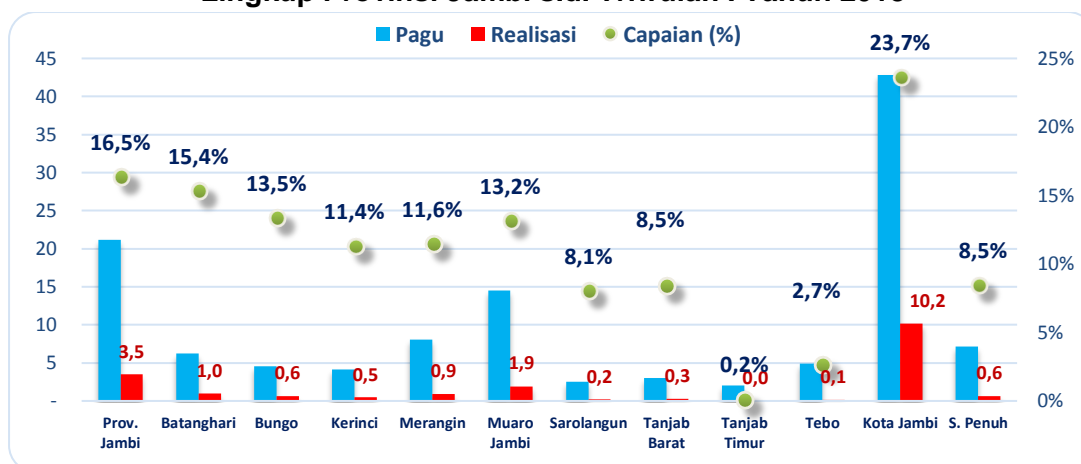


Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD (diolah) (dalam Miliar Rp)

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (agregat) s.d. triwulan I 2018 (Rp341,1 miliar) tercapai 20,05% dari target, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp332,8 miliar. Berikutnya, realisasi dan capaian penerimaan pajak daerah untuk Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi masing-masing sebesar Rp284,97 miliar (25%) dan Rp77,06 miliar (20%).

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2018

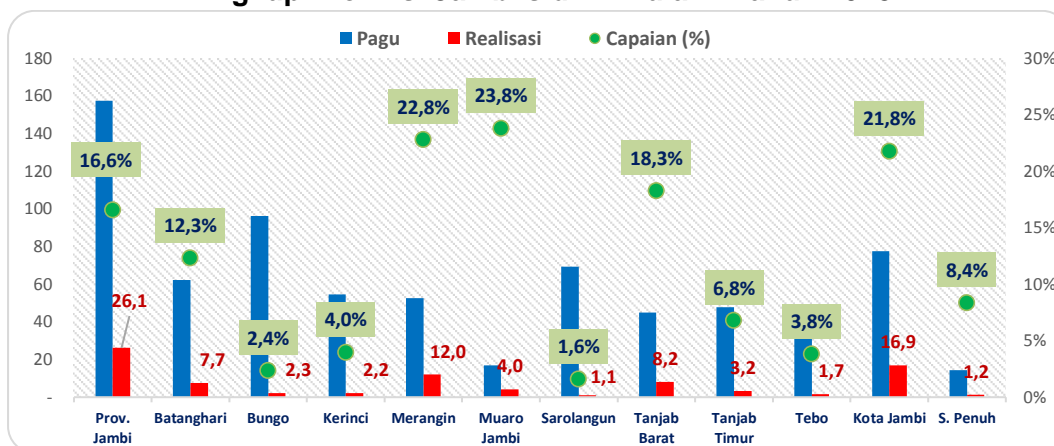


Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD (diolah) (dalam Miliar Rp)

Untuk Penerimaan Retribusi (seluruh Pemda) s.d. triwulan I 2018 (Rp19,7 miliar) baru tercapai 16,29% dari target. Dari sisi capaian, jumlah tersebut lebih baik jika dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu (12,15%), sedangkan dari sisi nominal tahun lalu sudah mencapai Rp24,27 miliar. Target penerimaan dari retribusi terbesar adalah Kota Jambi (Rp42,86 miliar) yang menjadi pusat perdagangan dan bisnis di Provinsi Jambi, realisasi hingga triwulan I sudah mencapai Rp10,16 miliar.

c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2018



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD (diolah) (dalam Miliar Rp)

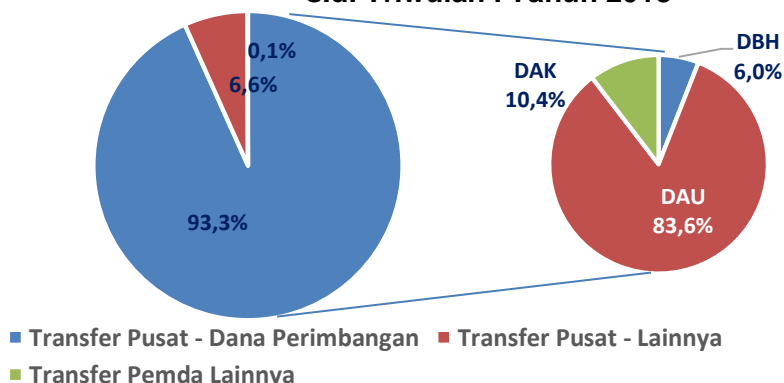
Berikutnya, Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah (agregat) s.d. triwulan I 2018 (Rp86,67 miliar) realisasinya telah mencapai 11,74% dari total target. Namun perlu kita ketahui bahwa sumber utama penerimaan lain-lain PAD yang sah berasal dari pendapatan dari BLUD dan pendapatan bunga deposito. Dan secara proporsi pendapatan bunga deposito lebih mendominasi, dimana kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh pemerintah daerah. Hal ini menggambarkan besarnya *idle money* yang dimiliki Pemda.

Besarnya Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari imbal jasa bunga deposito/simpanan perbankan mengindikasikan besarnya idle money yang dimiliki Pemda dan disimpan di perbankan

2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan data LRA seluruh Pemda (provinsi/kabupaten/kota) s.d. triwulan I, realisasi pendapatan transfer agregat mencapai Rp3,70 triliun. Terdiri dari transfer dana pemerintah pusat (Transfer dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya) masing-masing sebesar Rp3,04 triliun dan Rp216,0 miliar, dan transfer pemerintah provinsi (dana bagi hasil pajak) sebesar Rp2,06 miliar.

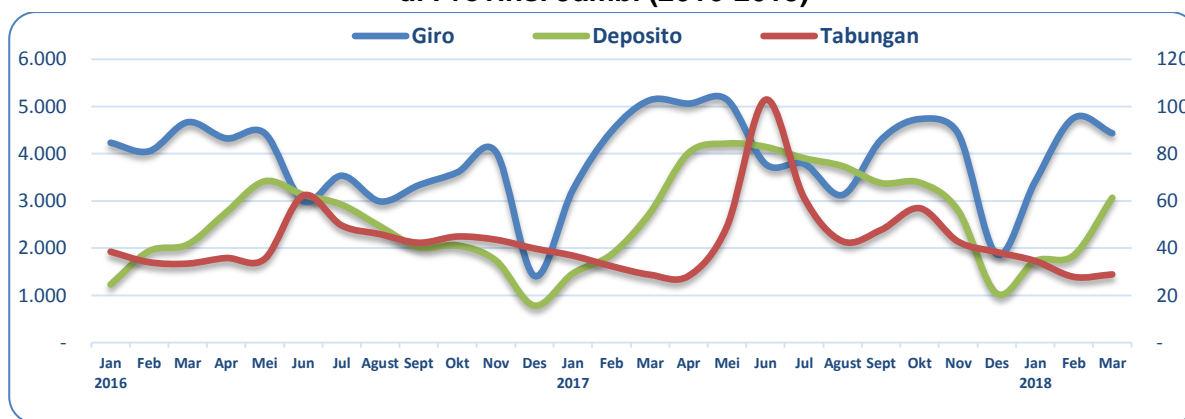
Grafik 3.4 Komposisi Pendapatan Transfer (Agregat) s.d. Triwulan I Tahun 2018



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD (data diolah)

Tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Penyebabnya pendapatan transfer masih menjadi sumber penerimaan utama bagi 12 pemda lingkup Provinsi Jambi.

Grafik 3.5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga 12 Pemda di Provinsi Jambi (2016-2018)



Sumber: Bank Indonesia (data diolah); (dalam Miliar Rp)

Berikutnya menurut data Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Indonesia, posisi per 31 Maret 2018 menunjukkan Giro, Deposito, dan Tabungan pemda mencapai **Rp4,43** triliun, **Rp3,06** triliun, dan Rp28,8 miliar. Besaran saldo deposito pemda pada triwulan I-2018 memiliki tren yang sama dengan periode tahun sebelumnya. Besarnya DPK Pemda (giro dan deposito) di perbankan menunjukkan masih rendahnya kinerja penyerapan belanja. Namun, opsi pilihan untuk menempatkan *idle money* di perbankan malah bersifat kontraproduktif terhadap kebijakan belanja pemerintah (*government spending*) sebagai stimulus ekonomi sehingga multiplier efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi menjadi tidak efektif.

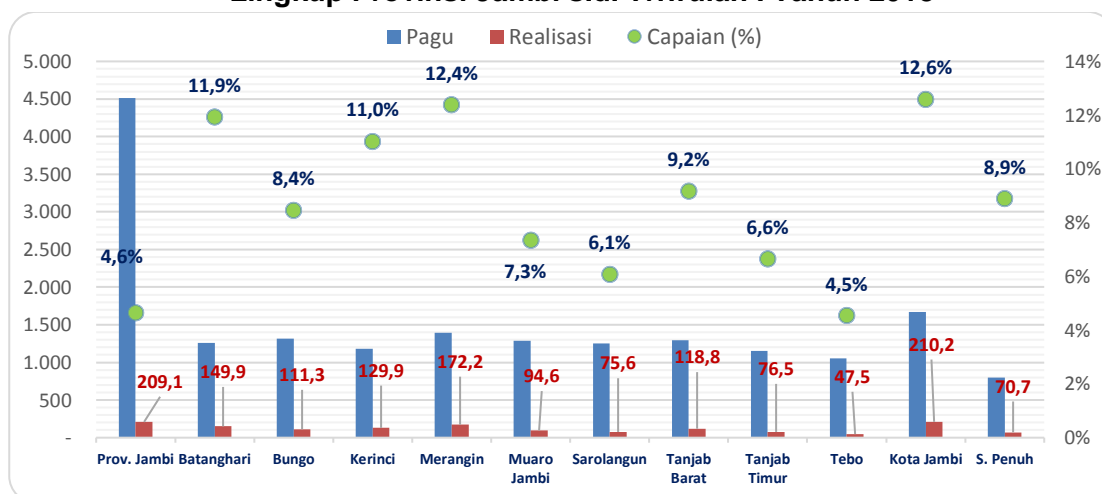
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan darurat, dan pendapatan lainnya, termasuk hibah langsung yang diterima oleh pemerintah daerah. Nilai realisasi dan capaian secara agregat s.d. triwulan I 2018 sebesar Rp675,5 juta, tidak terlalu signifikan jumlahnya jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

B. Belanja Daerah

1. Realisasi Belanja per Kabupaten/Kota

Grafik 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Per Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2018



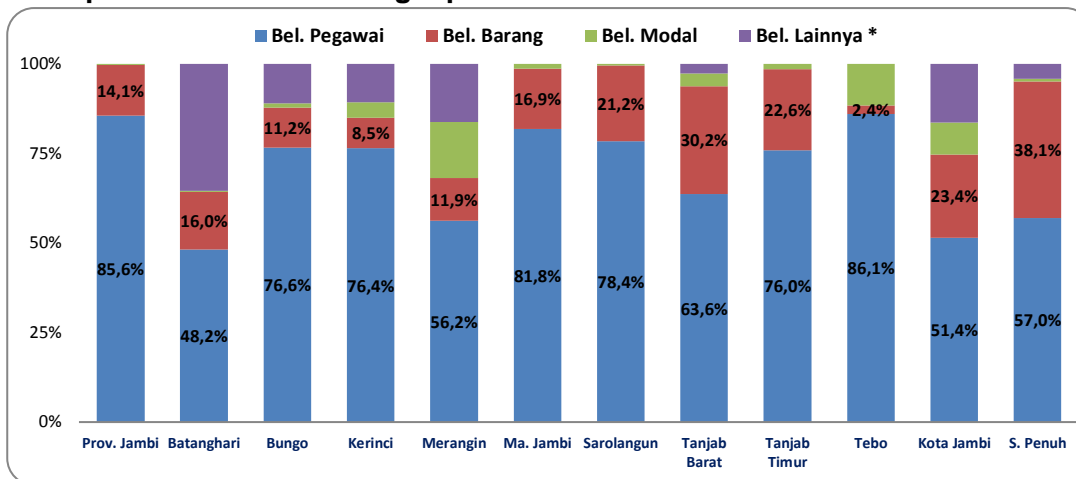
Sumber: DPKAD (diolah) (dalam Miliar Rp)

Secara agregat, realisasi belanja daerah hingga akhir triwulan I 2018 mencapai Rp1,46 triliun (8,07% dari total pagu). Capaian ini hanya sedikit lebih baik dibandingkan realisasi belanja

periode yang sama tahun 2017, terserap Rp1,35 triliun (7,84% dari total pagu). Masih rendahnya serapan realisasi belanja daerah mengakibatkan terjadinya **surplus** hingga mencapai **Rp2,24 triliun**. Dengan begitu, jika dirata-rata (dibagi 12 pemda) terdapat **idle money** dari transaksi berjalan sekitar Rp186,3 miliar.

2. Komposisi Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja per Kabupaten/Kota

Grafik 3.5 Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja per Prov/Kab/Kota Lingkup Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2018



Sumber: DPKAD/BKD/BPKAD (data diolah)

Ket: *) Bel. Subsidi, Hibah, Bansos, Tak Terduga, dan Bel. Transfer Desa

Menurut jenis belanja, realisasi APBD (agregat) masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp992,2 miliar (67,7% dari total realisasi belanja). Diikuti Belanja Barang sebesar Rp259,7 miliar (17,7%), Belanja Modal sebesar Rp66,69 miliar (4,5%), dan Belanja Lainnya sebesar Rp147,7 miliar (10,1%).

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2017

Perkiraan pendapatan dan belanja daerah (agregat) s.d. akhir tahun 2017 lingkup Provinsi Jambi masing-masing Rp14,8 triliun (90,9% dari target) dan Rp14,36 triliun (84,5%). Proyeksi tersebut cukup optimis mengingat adanya perbaikan kinerja belanja daerah pada triwulan ke II dan III tahun 2017 dan pelaksanaan monitoring evaluasi transfer ke daerah dan dana desa (Kanwil DJPB dan KPPN) terhadap kinerja penyerapan belanja dan capaian output, serta ketepatan waktu pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa pada masing-masing Pemda sehingga dapat memacu Pemda untuk lebih disiplin melaksanakan eksekusi belanja daerah.

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jambi Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2017

(dalam Miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV*	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	17.296,98	3.702,22	21,40%	17.229,41	99,61%
Belanja Daerah	18.327,37	1.466,31	8,00%	16.598,92	90,57%
Surplus/Defisit	(1.030,39)	2.235,91	-	630,49	-

Ket: *) perkiraan realisasi menggunakan metode analisis *trend*

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu. Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2018 dan 2017**

(dalam Miliar Rp)

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	4.257,80	3.486,62	4.717,28	260,9%	1.307,01
Pendapatan Perpajakan	613,99	340,18	954,17	-3,8%	992,20
Pendapatan Bukan Pajak	3.643,81	3.146,44	3.763,11	1098,9%	313,87
Hibah	-	0,00	0,00	-	0,94
Transfer *	-	0,00	0,00	-	-
Belanja Negara	4.277,43	1.410,09	4.814,18	133,5%	2.061,60
Belanja Pemerintah Pusat/Daerah	747,66	1.363,79	2.111,45	2,9%	2.052,92
Transfer	3.529,77	46,31	2.702,73	31040,0%	8,68
Surplus/(Defisit)	(20)	2.077	(97)	-87,2%	(755)
Pembiayaan	-	58,43	58,43	-75,3%	236,12
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	71,93	71,93	-73,3%	269,46
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	13,50	13,50	-59,5%	33,34
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(19,63)	2.134,96	(38,47)	-92,6%	(518,47)

Catatan:

- *) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah

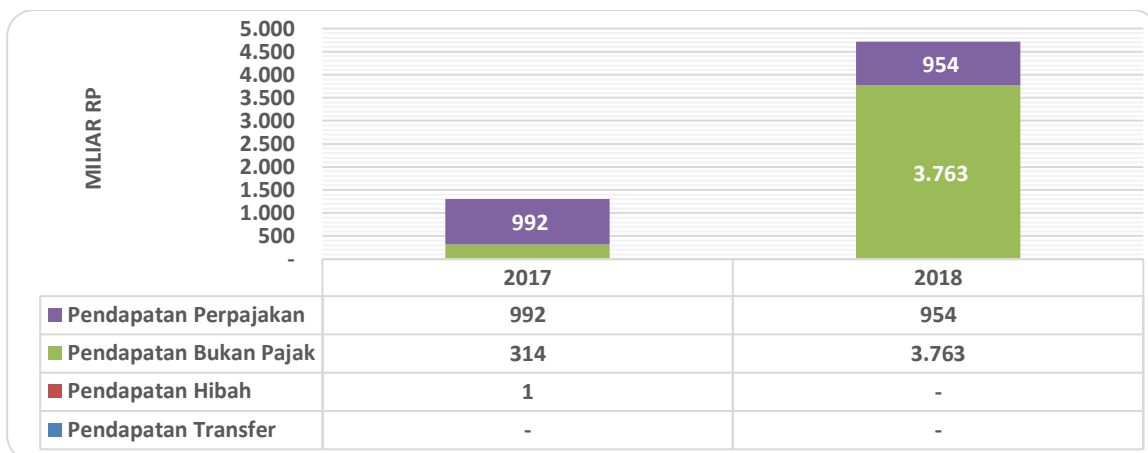
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Pemerintahan Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian dan PNBK konsolidasian terhadap total pendapatan konsolidasian. Perbandingan komposisi pendapatan, yaitu: antara pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pendapatan perpajakan dan PNBK, dan lain-lain. Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBK, hibah dan transfer dana bantuan ke desa.

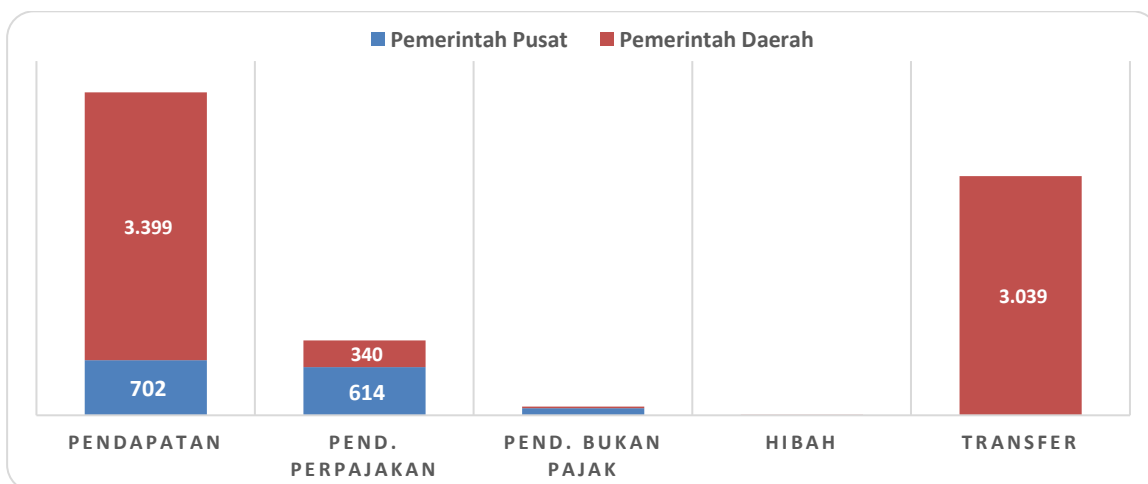
Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jambi s.d. Triwulan I TA 2018 dan 2017



Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Realisasi pendapatan konsolidasian s.d. triwulan I 2018 sebesar Rp4,7 triliun. Berdasarkan komposisinya, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, proporsi pendapatan perpajakan lebih kecil dibanding proporsi PNBPN. Peningkatan pendapatan bukan pajak konsolidasian, dari Rp314 miliar pada 2017 menjadi Rp3,76 triliun pada 2018, disebabkan adanya perubahan metode perhitungan (formula) laporan konsolidasian pemerintah. Pada formula sebelumnya, pendapatan transfer dan hibah merupakan akun tersendiri, sedangkan pada formula terbaru pendapatan transfer dan hibah direklasifikasi ke dalam akun PNBPN konsolidasian.

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jambi s.d. Triwulan I Tahun 2018

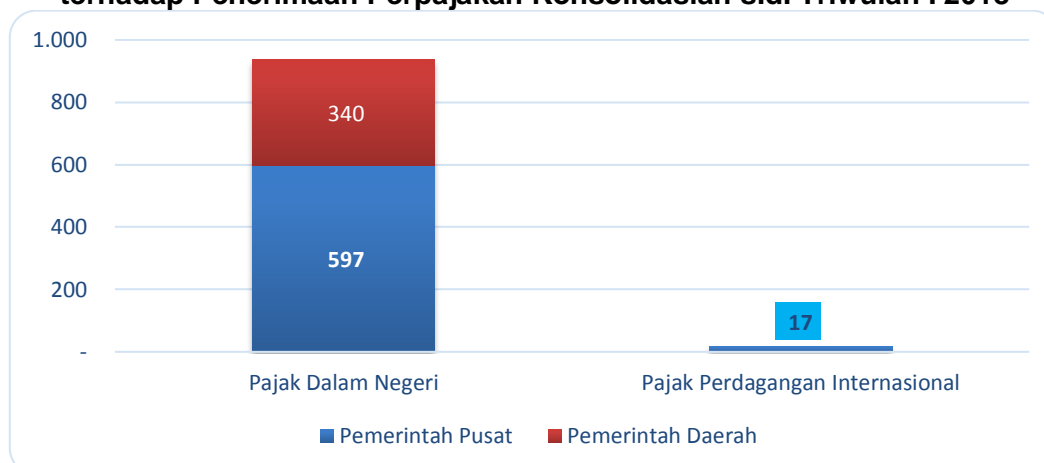


Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah); (dalam Miliar Rp)

Berikutnya, jika pendapatan konsolidasian ditelaah lebih lanjut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka terlihat jelas tingkat ketergantungan pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer. Total pendapatan pemerintah pusat di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp702 miliar, sedangkan dana transfer ke daerah mencapai Rp3,04 triliun sehingga terjadi defisit anggaran. Meskipun demikian, kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran masing-masing daerah sehingga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

2. Analisis Perubahan

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian s.d. Triwulan I 2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah); (dalam Miliar Rp)

Realisasi penerimaan perpajakan konsolidasian s.d. triwulan I sebesar Rp954,2 miliar. Proporsi pajak dalam negeri pemerintah pusat (Rp597 miliar) dan pemerintah daerah (Rp340 miliar) terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian masing-masing mencapai 62,5% dan 35,6%, sedangkan sisanya disumbang pajak perdagangan internasional. Dari total penerimaan perpajakan konsolidasian tersebut, nilai pajak dalam negeri (pusat dan daerah) masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total output ekonomi Jambi (atas dasar harga berlaku) sebesar Rp50,8 triliun. Jika realisasi pajak tersebut dijadikan acuan *tax ratio* di Provinsi Jambi, maka nilai *tax ratio*-nya hanya sebesar 7,9%.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Dengan tersedianya data realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat dan daerah, maka pendapatan di suatu daerah dapat diperluas tidak hanya pada PAD yang diterima Pemerintah Daerah namun mencakup seluruh penerimaan pemerintah pusat dan daerah di wilayah tersebut yang terdiri:

- Pendapatan pajak daerah,
- Retribusi daerah,
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- Lain-lain PAD yang sah.
- Penerimaan Perpajakan, PNBPN dan Pendapatan BLU Pemerintah Pusat

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	992,20	-	954,17	
PNBP	313,87	-	3.763,11	
Total	1.307,01	-	4.717,28	
PDRB/Pert. Ekonomi	46.058,93	-	50.083,99	

Sumber: LKPK Kanwil DJPB; BPS (diolah) (dalam miliar)

Pada triwulan I 2018, output ekonomi Jambi (atas dasar harga konstan) mencapai Rp50,08 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,66% (yoy). Sedangkan pada

periode yang sama, pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp954,17 miliar. Berikutnya, masih rendahnya *tax ratio* dan besarnya selisih (*gap*) nilai pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut, menunjukkan bahwa sebenarnya masih terdapat potensi penerimaan dari aktivitas perekonomian yang belum dioptimalkan pada penerimaan pemerintah daerah.

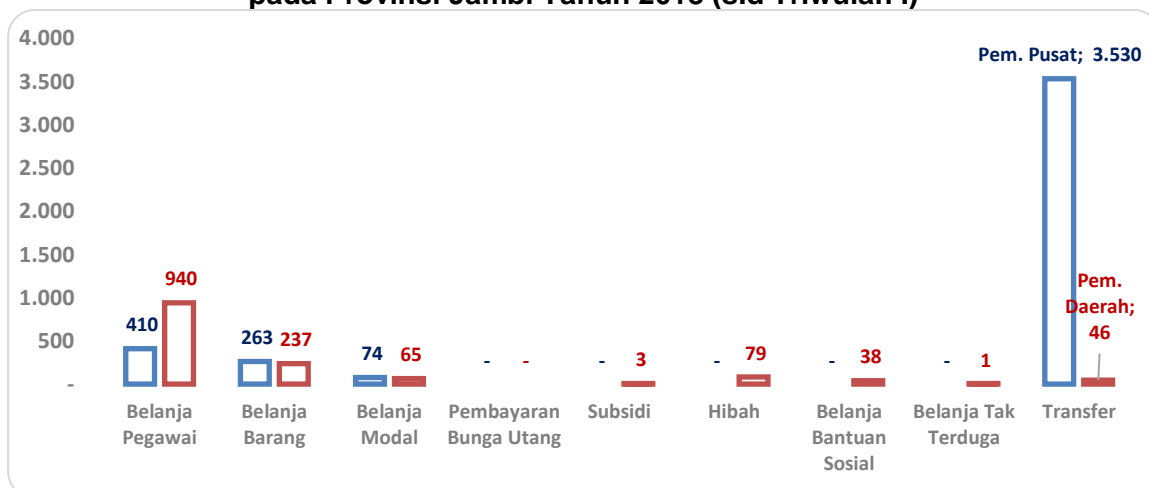
C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi). Analisis terhadap Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan atas:

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Proporsi dan komposisi realisasi berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), atau perbandingan antara realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja konsolidasian. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Jambi Tahun 2018 (s.d Triwulan I)

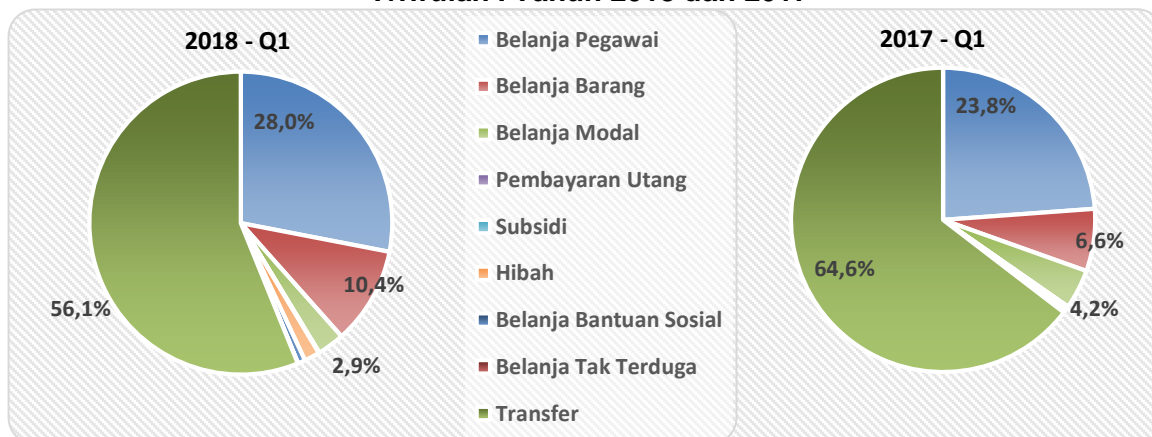


Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah); (dalam Miliar Rp)

Berdasarkan jenis belanja, porsi belanja operasi masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang masing-masing 23,7% dan 8,8% dari total belanja dan transfer konsolidasian. Sedangkan porsi belanja modal hanya sebesar 2,4% dari total belanja dan transfer konsolidasian. Masih kecilnya porsi belanja modal dibanding belanja barang, maka belanja/pengeluaran yang dilakukan harus difokuskan pada jenis program atau kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian (stimulus ekonomi) sehingga pertumbuhan ekonomi Jambi menjadi lebih optimal.

2. Analisis Perubahan

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasi Provinsi Jambi Triwulan I Tahun 2018 dan 2017

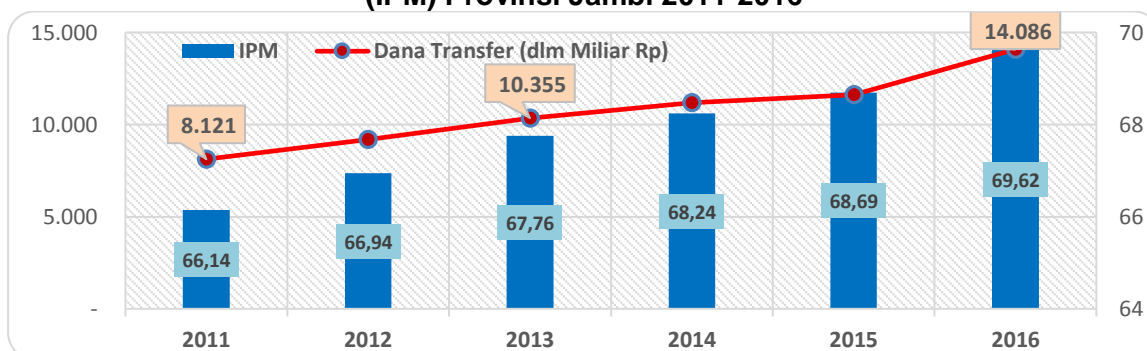


Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Secara umum, komposisi belanja konsolidasian s.d. triwulan I 2018 tidak terlalu berbeda jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain belanja Transfer, terbesar masih belanja pegawai 28,0% dari total belanja konsolidasian. Diikuti belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 10,4% dan 2,9%. Dibandingkan tahun sebelumnya, perbedaan cukup signifikan terdapat pada belanja modal yang mengalami kontraksi cukup dalam (pada tahun 2017 komposisinya mencapai 4,2%) dan meningkatnya transfer konsolidasian sebagai dampak langsung dari perubahan kebijakan penyaluran DAK Fisik (Reguler, Penugasan, dan Afirmasi) dan Dana Desa yang dimulai sejak triwulan II 2017 sesuai amanat PMK 112/PMK.5/2017 tentang Perubahan PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Grafik 4.6 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi 2011-2016



Kebijakan fiskal (dana transfer) pemerintah pusat lingkup Provinsi Jambi sejalan dengan kebijakan *money follow program* untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dalam IPM. Selanjutnya, perbaikan kualitas SDM tersebut harus mampu meningkatkan kinerja perekonomian sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diharapkan.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional, **C** = Konsumsi Rumah Tangga, **I** = Investasi,

G = Belanja Pemerintah, **X** = Ekspor, dan **M** = Impor

Salah satu analisis data GFS adalah analisis kontribusi pemerintah pada PDRB. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. Data yang digunakan untuk analisis tersebut dapat diambil dari Laporan Operasional (*Statement of Government Operations*). Laporan Operasional adalah ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi pada suatu periode akuntansi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Jambi triwulan III Tahun Pelaporan:

TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :		
A1	Pendapatan	5.031.849.198.904
a	Pajak	3.802.080.844.779
b	Kontribusi Sosial	0
c	Hibah	134.140.429.649
d	Pendapatan Lainnya	1.095.627.924.477
A2	Beban	10.781.652.448.177
a	Kompensasi Pegawai	5.937.534.293.389
b	Penggunaan Barang dan Jasa	2.811.839.176.943
a	Konsumsi Aset Tetap	0
b	Bunga	0
a	Subsidi	9.957.916.000
b	Hibah	1.986.582.899.690
a	Manfaat Sosial	29.018.440.747
b	Beban Lainnya	6.719.721.408
GOB	Keseimbangan Operasi Bruto/Neto (1-2+23+NOBz)	(5.749.803.249.273)
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :		
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	2.514.301.749.315
a	Aset Tetap	2.509.628.669.665
b	Perubahan Persediaan	0
c	Barang Berharga	0
d	Aset Non Produksi	4.673.079.650
NLB	Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	(8.264.104.998.587)
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :		
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	(8.266.351.509.697)
a	Dalam Negeri	(8.266.351.509.697)
b	Luar Negeri	0
c	Emas Moneter dan Hak Tarik Khusus (SDRs)	0
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(2.246.511.110)
a	Dalam Negeri	(2.246.511.110)
b	Luar Negeri	0

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Dalam Laporan Operasional, kita dapat menghitung kontribusi pemerintah terhadap PDRB, terutama dari belanja pemerintah (G) dan investasi (I). Nilai belanja pemerintah (G) dicerminkan/diproxikan dari nilai pengeluaran konsumsi pemerintah yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa. Sedangkan nilai investasi pemerintah dicerminkan/diproxikan dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap, dalam Laporan Operasional sama dengan nilai Aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto.

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB.

Perhitungan:

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah = Rp10,78 triliun, PMTB = Rp2,51 triliun dan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi = Rp48,07 triliun, maka didapatkan;

1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah $10,78/48,07 = 22,42\%$
2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah $2,51/48,07 = 5,22\%$

Berdasarkan data diatas, kontribusi belanja pemerintah terhadap output ekonomi Jambi mencapai 22,42%. Namun dari jumlah tersebut, sebagian akan terdistribusi ke dalam konsumsi rumah tangga jika dilihat dari struktur PDRB yang dirilis BPS. Melihat kontribusinya menunjukkan belanja pemerintah memiliki peran cukup signifikan terhadap perekonomian Jambi. Belanja pemerintah (belanja pegawai dan belanja barang) cenderung bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi perekonomian, sehingga peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi akan kurang optimal ketika realisasi belanja tidak terserap secara teratur dan hanya menumpuk di akhir tahun. Lain halnya dengan investasi pemerintah yang memiliki kontribusi 5,22% terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Meskipun nilainya tidak terlalu signifikan namun efeknya akan dirasakan dan mempengaruhi perekonomian pada masa yang akan datang.

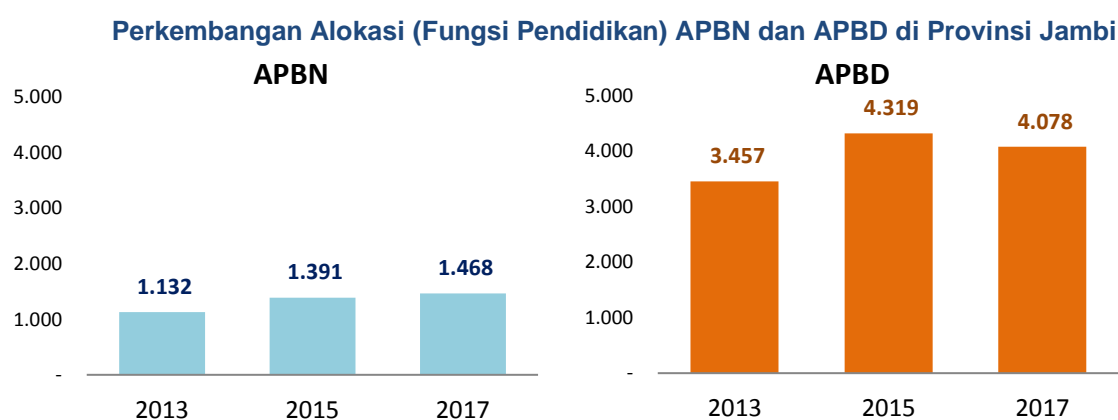
Untuk saat ini, realisasi belanja pemerintah perlu segera diakselerasi penyerapannya (khususnya belanja daerah) untuk menghindari penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran. Realisasi belanja yang ter-konsentrasi hanya pada triwulan IV akan berdampak pada tidak optimalnya kontribusi belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Ekonomi Jambi sangat bergantung terhadap sektor primer sehingga ketika terjadi *shock* pada harga dan permintaan komoditas unggulan (batubara, karet, dan CPO) akan langsung berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Jambi. Mempertimbangkan harga komoditas (sawit dan karet) yang masih fluktuatif hingga akhir tahun 2017, peran *government spending* sangat dibutuhkan sebagai stimulus perekonomian sehingga laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih mampu tumbuh meskipun ada resiko eksternal.

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Keterkaitan dan Implikasi Alokasi Belanja Sektor Pendidikan, Indikator Pembangunan Manusia (Pengetahuan), Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Jambi

Belanja Sektor Pendidikan

Komitmen pemerintah dalam pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Anggaran pendidikan juga disalurkan melalui transfer ke daerah (APBD) terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Sumber: Data SPAN dan LRA Pemda (dalam jutaan rupiah)

Indeks Pembangunan Manusia (Dimensi Pengetahuan)

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Kemudahan akses dan ketersediaan sarana prasana pendidikan akan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah menjadi lebih baik.

Tabel 1. Perkembangan IPM per Kab/Kota di Provinsi Jambi

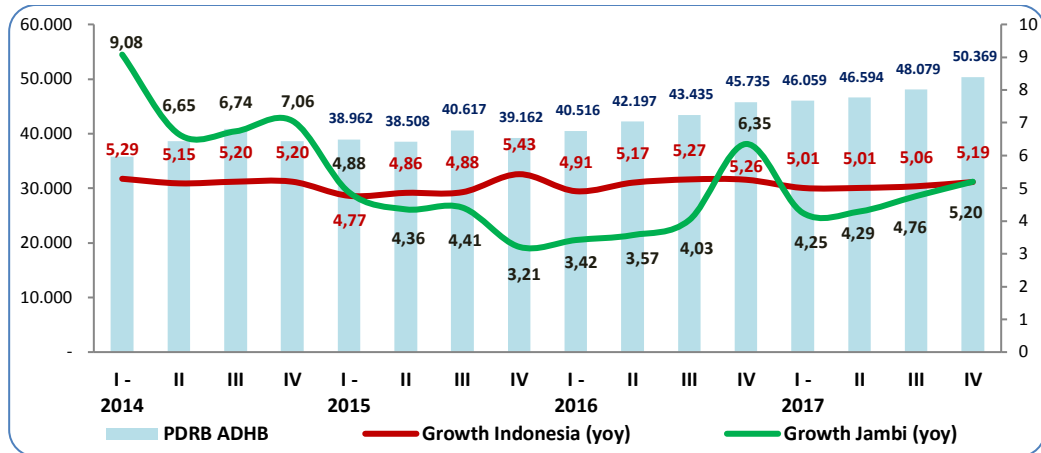
KABUPATEN/KOTA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kerinci	65,16	65,85	66,71	67,49	67,96	68,89	69,68
Merangin	63,85	64,40	65,31	65,82	66,21	67,40	67,86
Sarolangun	64,64	65,20	66,16	67,13	67,67	68,10	68,73
Batanghari	65,67	66,32	66,97	67,24	67,68	68,05	68,70
Muaro Jambi	62,84	63,39	64,17	65,14	65,71	66,66	67,55
Tanjung Jabung Timur	57,21	57,77	58,63	59,41	59,88	61,12	61,88
Tanjung Jabung Barat	61,49	61,98	62,86	63,54	64,04	65,03	65,91
Tebo	63,62	64,45	65,23	65,91	66,63	67,29	68,05
Bungo	66,28	66,70	67,20	67,54	67,93	68,34	68,77
Kota Jambi	72,23	72,96	73,78	74,21	74,86	75,58	76,14
Kota Sungai Penuh	69,91	70,55	71,23	72,09	72,48	73,03	73,35
PROVINSI JAMBI	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24	68,69	69,62

Sumber: BPS

IPM Kab/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Indikasi bahwa program pemerintah daerah di bidang pendidikan berjalan dengan sangat baik dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, tren positif tersebut perlu di-manage dengan baik sehingga tercipta kualitas sumber daya manusia Jambi yang kompetitif dalam menghadapi era perdagangan bebas (free trade zone) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pertumbuhan Ekonomi

Grafik 6. Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi

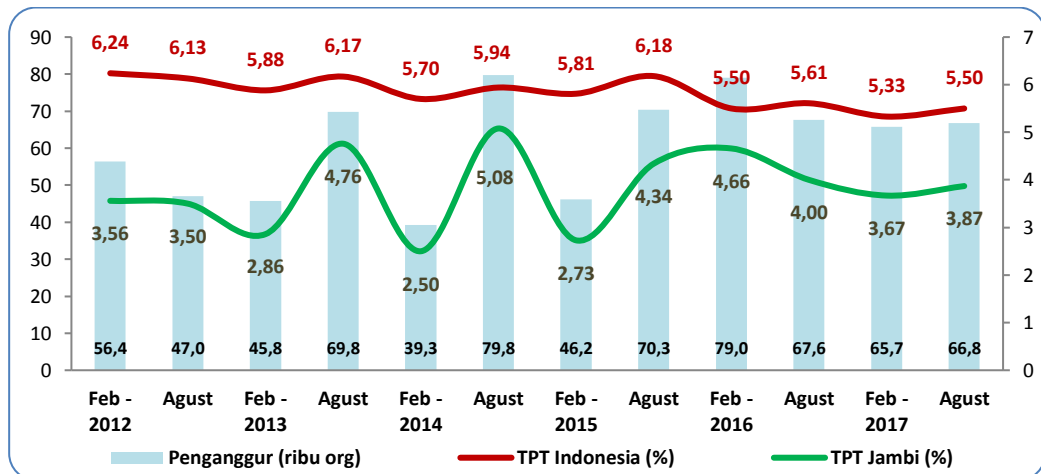


Sumber: BPS (dalam Miliar Rp)

Dilihat dari strukturnya, (sisi lapangan usaha) ekonomi Provinsi Jambi belum mengalami perubahan, masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,78% dan diikuti pertambangan dan penggalan sebesar 17,75%. Berdasarkan strukturnya menunjukkan bahwa ekonomi Jambi masih dominan berbasis pada sektor primer dengan kemampuan penciptaan nilai tambah yang rendah. Dari pergerakannya, ekonomi Jambi lebih dominan dipengaruhi oleh faktor eksternal (harga dan permintaan global komoditas unggulan). Dengan demikian, peran pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja baru terindikasi belum optimal memperhatikan data tingkat pengangguran di Provinsi Jambi.

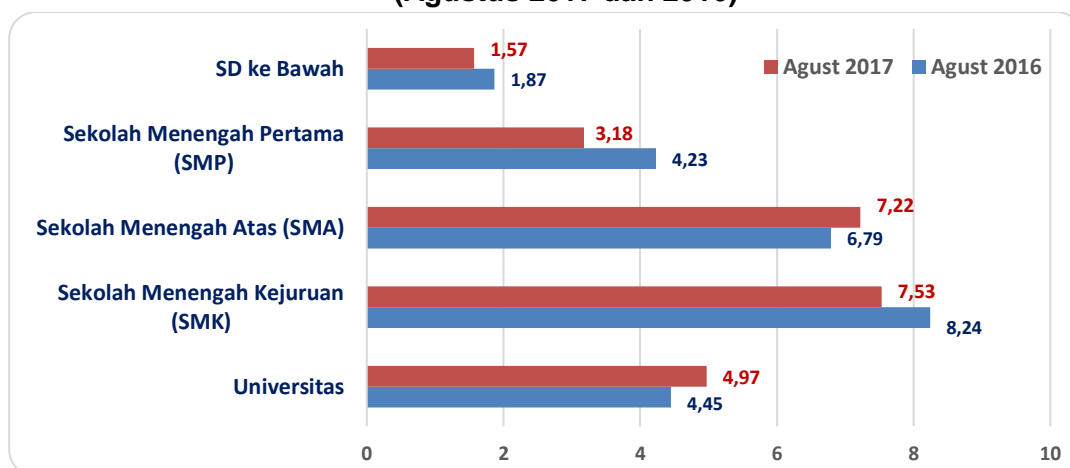
Tingkat Pengangguran

Grafik 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jambi dan Nasional Tahun 2012-2017



Sumber: BPS

Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan (Agustus 2017 dan 2016)



Sumber: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2017 sebesar 3,87%, turun dibandingkan pada Agustus 2016 (4,0%), dan masih lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang mencapai 5,50%. Meskipun jumlah TPT Jambi turun namun terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) penyumbang tertinggi tingkat pengangguran terdapat pada golongan dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), dapat diindikasikan bahwa keterampilan yang dihasilkan oleh jenjang pendidikan SMA/SMK belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. (2) tenaga kerja yang terserap lapangan kerja masih didominasi (42,6%) oleh golongan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD kebawah sebanyak 707,0 ribu orang.

Implikasi Kebijakan

1. Peningkatan alokasi belanja fungsi pendidikan merupakan amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan (*mandatory spending*) sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan sebagian alokasinya disalurkan melalui Transfer ke Daerah (pos belanja APBD).
2. Meningkatnya alokasi belanja untuk pendidikan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi modal utama untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Namun faktanya, tren positif peningkatan kualitas SDM belum mampu menjadi katalisator sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih tinggi dan mampu menciptakan lapangan kerja. Tolak ukurnya adalah tingkat pengangguran terdidik masih cukup tinggi di Provinsi Jambi, sebagian besar disumbang dari tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK.
4. Perlu ada evaluasi terhadap alokasi belanja fungsi pendidikan, khususnya kebijakan/program/kegiatan, sehingga baik *output* maupun *outcome* dari kebijakan di sektor pendidikan mampu memberikan implikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.